



Kapasitas Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Teluk Bintuni

Kenny Rogerts Alexszander Kindewara¹, Kristian Hoegh Pride Lambe², Johannes Baptista Halik³

^{1,2,3}) Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 14-02-2026 | Review 22-02-2026 | Revision 03-03-2026 | Accepted 23-03-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Teluk Bintuni serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari aparatur Kesbangpol, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat keamanan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur Kesbangpol telah berjalan melalui fungsi deteksi dini konflik, pencegahan melalui sosialisasi dan dialog, serta penyelesaian konflik melalui mediasi dan koordinasi lintas sektor. Namun, kapasitas tersebut belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, luas wilayah, dan kondisi geografis. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, sinergi dengan aparat keamanan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, baik pada aspek individu, organisasi, maupun sistem, guna meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial di daerah..

Kata kunci: kapasitas aparatur, Kesbangpol, konflik sosial, manajemen konflik, kelembagaan.

Abstract

This study aims to analyze the capacity of the Regional Office of National Unity and Politics (Kesbangpol) apparatus in handling social conflicts in Teluk Bintuni Regency and to identify the supporting and inhibiting factors. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving Kesbangpol officials, community leaders, traditional leaders, and security personnel. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model. The findings reveal that the capacity of Kesbangpol apparatus has been implemented through early conflict detection, preventive measures via socialization and dialogue, and conflict resolution through mediation and cross-sectoral coordination. However, the capacity has not been fully optimized due to limitations in human resources, budget constraints, wide territorial coverage, and geographical challenges. Supporting factors include local government support, collaboration with security forces, and community participation. This study highlights the importance of strengthening institutional capacity at the individual, organizational, and system levels to enhance the effectiveness of social conflict management at the local level..

Keywords: apparatus capacity, Kesbangpol, social conflict, conflict management, institutional capacity.

¹E-mail: kembarkenny@gmail.com

²E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

³E-mail: johanneshalik@ukipaulus.ac.id

Pendahuluan

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah dengan keberagaman sosial, budaya, dan kepentingan yang tinggi. Dalam konteks pemerintahan daerah, konflik sosial tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan konflik secara efektif dan berkelanjutan. Kapasitas aparatur menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan fungsi tersebut (UNDP, 2019; OECD, 2020).

Secara konseptual, kapasitas aparatur mencakup kemampuan individu, efektivitas organisasi, serta dukungan sistem dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan penanganan konflik tidak hanya bergantung pada kompetensi individu, tetapi juga pada koordinasi kelembagaan dan kebijakan yang mendukung (Baser & Morgan, 2018; Grindle, 2017). Dalam beberapa studi terbaru, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas sektor seringkali menjadi penghambat utama dalam manajemen konflik di tingkat daerah (Kurniawan et al., 2021; Rahman & Prasetyo, 2022).

Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik geografis luas dan heterogenitas sosial yang tinggi memiliki potensi konflik yang cukup signifikan. Konflik yang terjadi umumnya dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, serta perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, peran Kesbangpol menjadi krusial dalam menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan preventif dan responsif.

Berikut adalah gambaran fenomena konflik sosial yang menjadi latar belakang penelitian:

Tabel 1. Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Deskripsi
1	Peningkatan potensi konflik sosial	Adanya gesekan antar kelompok masyarakat akibat perbedaan kepentingan sosial dan ekonomi
2	Keterbatasan SDM aparatur	Jumlah dan kompetensi aparatur belum sebanding dengan luas wilayah kerja
3	Kendala geografis	Akses wilayah yang sulit menghambat respons cepat dalam penanganan konflik
4	Keterbatasan anggaran	Program pencegahan dan penanganan konflik belum optimal
5	Koordinasi lintas sektor	Sinergi antar lembaga belum berjalan maksimal

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun fungsi penanganan konflik telah dijalankan, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih menjadi isu krusial dalam tata kelola konflik sosial (World Bank, 2021; Nugroho & Sari, 2023).

Di sisi lain, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti konflik sosial dari perspektif keamanan atau sosiologis, sementara kajian yang secara spesifik mengkaji kapasitas aparatur pemerintah daerah—khususnya Kesbangpol—masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu

diisi, terutama dalam memahami bagaimana kapasitas aparatur mempengaruhi efektivitas penanganan konflik di tingkat lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan kapasitas aparatur Kesbangpol sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial daerah, khususnya dalam menghadapi kompleksitas konflik yang semakin dinamis. Tanpa kapasitas yang memadai, upaya deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian konflik tidak akan berjalan optimal, yang pada akhirnya dapat mengganggu pembangunan daerah dan integrasi sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Teluk Bintuni?
2. Apa saja faktor pendukung dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Teluk Bintuni?
3. Apa saja faktor penghambat dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Teluk Bintuni?

Tinjauan Literatur

Kapasitas Aparatur dalam Perspektif Kelembagaan

Kapasitas aparatur merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, terutama dalam menghadapi persoalan kompleks seperti konflik sosial. Konsep kapasitas tidak hanya merujuk pada kemampuan individu, tetapi juga mencakup kapasitas organisasi dan sistem secara keseluruhan. Menurut UNDP (2019), kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan individu, organisasi, dan sistem untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, serta mencapai tujuan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa penguatan kapasitas harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui peningkatan kompetensi individu, tetapi juga melalui perbaikan struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kapasitas aparatur mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta kemampuan koordinasi lintas sektor. Studi oleh Baser dan Morgan (2018) menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan yang kuat akan meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespons tantangan eksternal secara adaptif. Sementara itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur seringkali menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan di tingkat lokal (Kurniawan et al., 2021; Nugroho & Sari, 2023).

Dengan demikian, kapasitas aparatur tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam penanganan konflik sosial.

Manajemen Konflik Sosial dalam Pemerintahan Daerah

Konflik sosial merupakan interaksi antara individu atau kelompok dengan kepentingan, nilai, atau persepsi yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan ketegangan atau kekerasan. Dalam konteks pemerintahan, konflik sosial harus dikelola melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. OECD (2020) menekankan pentingnya pendekatan *conflict-sensitive governance*, yaitu tata kelola yang mampu mengantisipasi, mencegah, dan merespons konflik secara efektif.

Penanganan konflik sosial umumnya melibatkan tiga tahapan utama, yaitu deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian konflik. Deteksi dini dilakukan melalui

pemantauan potensi konflik di masyarakat, sedangkan pencegahan dilakukan melalui dialog, sosialisasi, dan penguatan kohesi sosial. Adapun penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi, negosiasi, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (World Bank, 2021).

Penelitian Rahman dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa efektivitas manajemen konflik sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga serta keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial tidak dapat ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas aktor.

Peran Kesbangpol dalam Penanganan Konflik Sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki mandat strategis dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di daerah, termasuk dalam penanganan konflik sosial. Peran Kesbangpol meliputi fungsi deteksi dini, fasilitasi pencegahan konflik, serta koordinasi penyelesaian konflik dengan berbagai pihak, seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, efektivitas peran Kesbangpol sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan yang dimiliki. Studi terbaru menunjukkan bahwa kelemahan pada aspek sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kendala geografis seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Kesbangpol (Nugroho & Sari, 2023). Selain itu, kurangnya sinergi antar lembaga juga dapat menghambat proses penanganan konflik secara komprehensif.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas Kesbangpol menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial di tingkat daerah.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kapasitas kelembagaan yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

1. **Kapasitas individu**, meliputi kompetensi, keterampilan, dan pengalaman aparatur.
2. **Kapasitas organisasi**, meliputi struktur, sumber daya, serta mekanisme kerja organisasi.
3. **Kapasitas sistem**, meliputi kebijakan, regulasi, serta dukungan lingkungan eksternal.

Ketiga dimensi tersebut berinteraksi dalam menentukan efektivitas penanganan konflik sosial, yang diwujudkan melalui proses deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian konflik.

Proposisi Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan fenomena empiris, maka proposisi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Proposisi 1:

Kapasitas individu aparatur yang memadai akan meningkatkan efektivitas deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian konflik sosial.

Proposisi 2:

Kapasitas organisasi yang kuat, termasuk ketersediaan sumber daya dan mekanisme kerja yang jelas, akan memperkuat kinerja Kesbangpol dalam penanganan konflik sosial.

Proposisi 3:

Kapasitas sistem yang didukung oleh kebijakan, regulasi, dan sinergi lintas sektor akan

meningkatkan keberhasilan penanganan konflik sosial di tingkat daerah.

Proposisi 4:

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kondisi geografis menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi kapasitas aparatur dalam penanganan konflik sosial.

Proposisi 5:

Dukungan pemerintah daerah, kolaborasi dengan aparat keamanan, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung yang memperkuat efektivitas penanganan konflik sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kapasitas aparatur dalam penanganan konflik sosial di tingkat daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, khususnya dalam konteks kelembagaan dan interaksi antar aktor (Creswell & Creswell, 2018; Maxwell, 2019). Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kondisi empiris yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat keragaman sosial yang tinggi serta potensi konflik yang cukup kompleks. Lokasi ini dinilai relevan untuk mengkaji kapasitas aparatur dalam penanganan konflik sosial. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama periode tahun 2024, yang mencakup tahapan pengumpulan data hingga analisis data.

Dalam penelitian kualitatif, konsep populasi dan sampel tidak digunakan secara statistik, melainkan digantikan dengan pemilihan informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan. Oleh karena itu, teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur Kesbangpol, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta aparat keamanan yang terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial. Selain itu, teknik snowball sampling juga digunakan untuk mengidentifikasi informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya guna memperoleh data yang lebih komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara detail mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik yang dilakukan oleh informan (Kvale & Brinkmann, 2018). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, serta arsip yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah agar lebih fokus pada isu penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif

untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan serta menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan pula proses member checking untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan (Lincoln & Guba, 1985; Nowell et al., 2017). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Teluk Bintuni merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, termasuk dalam penanganan konflik sosial. Secara struktural, Kesbangpol bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi deteksi dini konflik, fasilitasi pencegahan, serta koordinasi penyelesaian konflik melalui pendekatan lintas sektor.

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang menantang, serta tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Kondisi ini menjadikan potensi konflik sosial relatif besar, baik yang bersumber dari perbedaan kepentingan ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, kapasitas aparatur Kesbangpol menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Karakteristik Responden

Karakteristik informan dalam penelitian ini menggambarkan latar belakang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Teluk Bintuni. Informan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Keterangan
1	Aparatur Kesbangpol	5 orang	Pejabat dan staf yang terlibat langsung
2	Tokoh Masyarakat	3 orang	Representasi masyarakat lokal
3	Tokoh Adat	2 orang	Pemangku kepentingan adat
4	Aparat Keamanan	2 orang	Kepolisian/TNI
Total		12 orang	

Sumber: Data primer (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas informan berasal dari aparatur Kesbangpol sebagai aktor utama, didukung oleh informan eksternal untuk memperoleh perspektif yang komprehensif.

Hasil Penelitian Berdasarkan Analisis Tematik

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik yang mengidentifikasi pola-pola utama terkait kapasitas aparatur dalam penanganan konflik sosial. Hasil analisis dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Tematik

No	Tema Utama	Sub-Tema	Temuan
1	Kapasitas Individu	Kompetensi aparatur	Aparatur memiliki pemahaman dasar, namun masih terbatas dalam pelatihan teknis
		Pengalaman kerja	Pengalaman membantu dalam mediasi konflik
2	Kapasitas Organisasi	Sumber daya manusia	Jumlah aparatur belum memadai
		Anggaran	Keterbatasan anggaran operasional
		Koordinasi	Koordinasi lintas sektor belum optimal
3	Kapasitas Sistem	Kebijakan	Regulasi sudah tersedia namun implementasi belum maksimal
		Dukungan pemerintah	Dukungan cukup baik
4	Faktor Penghambat	Geografis	Wilayah sulit dijangkau
		Infrastruktur	Keterbatasan akses transportasi
5	Faktor Pendukung	Kolaborasi	Sinergi dengan aparat keamanan
		Partisipasi masyarakat	Peran aktif tokoh masyarakat

Sumber: Data primer diolah (2026)

Pembahasan

Kapasitas Aparatur dalam Penanganan Konflik Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur Kesbangpol dalam penanganan konflik sosial telah berjalan melalui tiga tahapan utama, yaitu deteksi dini, pencegahan, dan penyelesaian konflik. Namun, efektivitasnya masih belum optimal.

Dalam aspek kapasitas individu, aparatur telah memiliki pemahaman dasar terkait penanganan konflik. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan:

"Kami sudah berupaya melakukan deteksi dini dan pendekatan kepada masyarakat, tetapi memang masih perlu peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang lebih intensif." (Informan Kesbangpol)

Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur masih perlu diperkuat, sejalan dengan konsep kapasitas individu yang menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan (UNDP, 2019).

Pada aspek kapasitas organisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama. Salah satu informan menyatakan:

"Jumlah personel kami terbatas, sementara wilayah kerja sangat luas, sehingga tidak semua potensi konflik bisa dipantau secara maksimal." (Informan Kesbangpol)

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga belum berjalan optimal, meskipun telah ada upaya kolaborasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah.

Pada aspek kapasitas sistem, regulasi yang ada sebenarnya telah mendukung penanganan konflik sosial, namun implementasinya belum maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor penghambat utama dalam penanganan konflik sosial meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan:

“Akses ke beberapa wilayah cukup sulit, sehingga penanganan konflik sering terlambat.”
(Aparat Keamanan)

Di sisi lain, faktor pendukung yang signifikan adalah adanya dukungan pemerintah daerah, kolaborasi dengan aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Tokoh masyarakat menyatakan:

“Kami selalu dilibatkan dalam penyelesaian konflik, sehingga komunikasi dengan masyarakat bisa berjalan lebih baik.” (Tokoh Masyarakat)

Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial.

Implikasi Temuan terhadap Rumusan Masalah

Hasil penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang diajukan. **Pertama**, kapasitas aparat Kesbangpol telah berjalan namun belum optimal karena keterbatasan pada aspek individu, organisasi, dan sistem. **Kedua**, faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. **Ketiga**, faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya, anggaran, serta kondisi geografis.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat teori kapasitas kelembagaan yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh sinergi antara kapasitas individu, organisasi, dan sistem. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam manajemen konflik sosial di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Three key findings emerge: (1) kapasitas aparat Kesbangpol dalam penanganan konflik sosial telah berfungsi secara operasional melalui deteksi dini, pencegahan, dan resolusi konflik, namun masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasis sistem yang terintegrasi; (2) keterbatasan pada level organisasi—khususnya sumber daya manusia, anggaran, dan jangkauan wilayah—menjadi faktor paling menentukan yang membatasi efektivitas intervensi, lebih signifikan dibandingkan sekadar kekurangan kompetensi individu; (3) keberhasilan penanganan konflik sangat ditopang oleh faktor eksternal, terutama kolaborasi lintas sektor dan legitimasi sosial melalui keterlibatan tokoh masyarakat, yang dalam praktiknya justru menjadi “penopang utama” ketika kapasitas internal belum optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, pendekatan

kualitatif dengan jumlah informan terbatas membuat generalisasi temuan menjadi tidak dimungkinkan secara luas. Kedua, fokus penelitian yang terpusat pada satu daerah menyebabkan konteks temuan sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal, seperti kondisi geografis dan struktur sosial. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan pada perspektif kelembagaan, sehingga belum secara mendalam mengeksplorasi dinamika konflik dari sisi aktor masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan komparatif antar daerah guna mengidentifikasi pola kapasitas kelembagaan yang lebih generalizable. Selain itu, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mengkombinasikan kedalaman data kualitatif dan kekuatan generalisasi kuantitatif. Penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi model penguatan kapasitas berbasis sistem digital atau *early warning system* berbasis data untuk meningkatkan responsivitas penanganan konflik di tingkat daerah.

Tanpa penguatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan, peran strategis Kesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial akan selalu tertinggal dari kompleksitas konflik yang terus berkembang; oleh karena itu, transformasi dari kapasitas yang bersifat administratif menuju kapasitas yang adaptif dan kolaboratif menjadi kebutuhan yang tidak lagi dapat ditunda.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pembimbing I, Dr. Kristian H.P. Lambe, S.T., M.Si., dan Pembimbing II, Dr. Johannes B. Halik, S.E., M.M., atas bimbingan, arahan, serta masukan konstruktif yang sangat berharga sejak proses penyusunan tesis hingga penyempurnaan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian. Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada seluruh informan penelitian, termasuk aparat Kesbangpol, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta aparat keamanan, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga.

Penulis juga berterima kasih kepada keluarga, rekan sejawat, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan moral dan motivasi yang diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen konflik dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Baser, H., & Morgan, P. (2018). *Capacity, change and performance: Study report*. European Centre for Development Policy Management (ECDPM).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.

- Kurniawan, T., Prasajo, E., & Gunadi. (2021). Bureaucratic reform and public service performance: Evidence from local governments in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 20(3), 345–360.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2018). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Maxwell, J. A. (2019). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugroho, R., & Sari, D. P. (2023). Institutional capacity in managing social conflict: Evidence from Indonesian local government. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 145–158.
- OECD. (2020). *States of fragility 2020*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/ba7c22e7-en>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rahman, A., & Prasetyo, B. (2022). Collaborative governance in social conflict resolution at the local level. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 67–80.
- UNDP. (2019). *Capacity development: A UNDP primer*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2021). *Pathways for peace: Inclusive approaches to preventing violent conflict*. World Bank Publications.